

A. Buku

- Ali, Z. (2019). *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-11. Jakarta: Sinar Grafika
- Butar-Butar, E.N. (2018). *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama), 2018.
- Chazawi, Adami. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Cooper, D.R., & Schindler, P.S. (2014)., *Business Research Methods* (Twelfth Ed). New York: McGraw-Hill International Edition.
- Creswell, J.W., & J. David Creswell, J.D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods*. Fifth edition. Los Angeles: SAGE Publications.
- Diantha, I.M.P. (2019). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, cetakan ke-3. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Fuady, M. (2002). Doktrin-doktrin Modern dalam *Corporation law* dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia. Bandung: Penerbit PT Aditya.
- Hamzah, A. (1983). *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hiariej, E.O.S.(2022). *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Iqbal, Muhammad, Suhendar dan Ali Imron .(2019). *Hukum Pidana*, UnPam Press.
- Ishaq .(2019). *Hukum Pidana*. Depok : Rajawali Press.
- Kriesbeg, L. (2006). *Constructive Conflict from Escalation to Resolution*. Maryland: Rowman and Littlefield Publisher Inc.
- Lamintang, P.A.F dan Franciscus Theojunior Lamintang. (2014). *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mantili, R., & Afriana, A. (2015). *Hukum Acara Perdata*. Bandung: CV Kalam Media
- Marzuki, P.M. (2015). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada
- Mathew B. Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Soorcebook*. Edition 3.Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc.
- Mertokusumo, S. (2002), *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Miles, M., Huberman, A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications.

- Prodjodikoro, Wirjono. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Purbacaraka, P., & Soekanto, S. (1983). *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill Buidling Approach* (Seventh Edition). West Sussex: John Wiley & Sons, Inc.
- Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2022). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-21. Jakarta: Rajawali Press.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeria.
- Sofyan, Andi dan Nur Azizah. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar : Pustaka Pena Press.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Penerbit Intermasa.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Takdir. (2013). *Mengenal Hukum Pidana*. Penerbit Laskar Perubahan.
- Wignjosoebroto, S. (2013). *Hukum, Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press.
- Yusmad, M.A. (2018). *Aspek Hukum Perbankan Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/POJK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditasi Rakyat dan Bank pembiayaan Rakyat Syariah.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1595 K/Pid.Sus/2020 tanggal 28 Mei 2020
- Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 680/Pid.B/2020/Pn.Cbi
- Putusan Pengadilan Negeri Gianyar, Provinsi Bali, dengan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Gin tahun 2021.

C. Jurnal, Disertasi dan Tesis

- Agustina, S. (2015). Implementasi Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam Sistem Peradilan Pidana. *MMH*, Vol 44. No 4.
- Anonim. (2021). Konsep *Prejudicial Geschil* dalam Pemeriksaan Perkara Pidana dan Perkara Perdata. *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol 6. No 1.
- Djarmiko, A.A., Sanjaya, R., Hidayati, R.K. (2022). Dampak Yuridis Anomali Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam Ketentuan Hukum Pidana Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol 2. No 8.
- Elias, R.F; & Nachrawy, N. (2021). Konsep Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus*) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, Vol 10. No 5.
- Hidayat, S., Handrawan, Herman, Haris, O.K., Heryanti, & Irayana. (2023). Penanggungan Putusan Perkara Pidana Melalui Putusan Sela oleh Hakim dengan Alasan Menunggu Putusan Perkara Perdata (Studi Putusan Sela Pengadilan Nomor 143/Pid.B/2021/PN.Lkdi, *Halu Oleo Legal Research*, Vol 5. No 1.
- Indriana, A. (2018). Tindak Pidana dan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah,” *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 2(2), 160 -180.
- Kuswardani.(2017), Kontribusi Hukum Pidana dalam Pengaturan Perbankan Syariah (Studi terhadap kebijakan Legislatif Perbankan Syariah). *Jurisprudence*, 7(1), 47-58.
- Maya, A., & W, K.A. (2021). Kewenangan Hukum Administrasi Terkait Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan ganesha, *Program Studi Ilmu Hukum*, Vol 4. No 3.
- Nugroho, F.M. (2021). Konsepsi Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Korupsi terdapat Kerugian Negara. *Jurnal Anti Korupsi*, Vol 3. No 1.
- Putra, I.B.G.A., Dewi, A.A.S.L., & Suryani, L.P. (2022). Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Putusan 58/Pid.B/2021/PNJ gin). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(3), 476-481.
- Permadani, A.K., Mulyanti, D., Ferindra, R.G., & Linasari, Y. Pertanggungjawaban Komisaris Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan Ditinjau dari Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) (Analisa Putusan Nomor 1595 K/Pid.Sus/2020). Dapat diunduh pada <https://openjournal.unpam.ac.id>.
- Rahayu, D.P.P., Parman, L., & Asikin, Z. (2023). Kewenangan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Komisi Pemberantasan Korupsi. *Indonesia Berdaya*, Vol 4. No 2.

Saifuddin, B., & Widodo, T. (2020). Penyelesaian Tindak Pidana yang di Dalamnya Terdapat Perselisihan Perdata (Suatu Tinjauan Normatif). *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol 7. No 1.

Subekti, T. (2008). Batasan Tanggung Jawab Direksi atas Kerugian Perusahaan. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 8. No 1.

Sulistian, B. (2019). Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata dalam Perselisihan Prejudisial Geschil. *Tesis* pada Magister Hukum, Program Studi Magister, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya.

Utami, N.A., Fadillah, S., & Fauziah. (2020). Analisis Penerapan Prinsip *Prejudicial Geschil* dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1242/Pid.B/2018/PN Bks Tanggal 1 November 2018. *Jurisdictie*, Vol 2. No 1.

Yuliska, E. (2020). Terpenuhi atau Tidak Terpenuhi Unsur Pidana Penguasaan Tanah yang Sama-sama Belum Memiliki Sertifikat Tanda Bukti Hak. *Ensiklopedia Social Review*, Vol 2. No 1.

Yusriadi, S., Suhadi, & Rosdiana. (2020). Analisis Hukum terhadap Penegakan Hukum Perbarengan antara Tindak Pidana Penggelapan dengan Tindak Pidana Narkotika di Kota Balikpapan. *Jurnal Lex Suprema*, 2(1), 127-146.

Wati, U.R. (2023). Ekistensi Perampasan Aset pada Tindak Pidana Korupsi yang Dibatalkan Melalui Gugatan Perdata. *Tesis* pada Universitas Islam Indonesia, Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum.

Wowor, Andre. (2019). Pertanggungjawaban Polisi Atas Tindak Pidana Yang Dilakukannya Menurut Hukum Pidana. *Lex Crimen* Vol. VIII No. 3..

D. Internet

Ambarwati, D.L. (2021). Perbedaan Perkara Perdata dengan Perkara Pidana. Dapat diunduh dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambib/baca-artikel/Perbedaan-Perkara-Perdata-dengan-Perkara-Pidana.html>

“Analisis Penerapan Pasal 64 ayat (1)” diunduh tanggal 30 Oktober 2023 dari [https://pnmasohi.go.id/analisis~:text=Ketentuan%20Pasal%2064%20ayat%20\(1\)%20KUHP%20menyatakan%20jika%20antara,beda%2C%20yang%20dikenakan%20yang%20memuat](https://pnmasohi.go.id/analisis~:text=Ketentuan%20Pasal%2064%20ayat%20(1)%20KUHP%20menyatakan%20jika%20antara,beda%2C%20yang%20dikenakan%20yang%20memuat)

Ardisasmita, Sy. (2006). Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcemkent untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Dapat diunduh pada <https://www.kppu.go.id/docs>

DS. (2021). Perdata Tunda Pidana atau Pidana Tunda Perdata? KlikLegal.com, 20 September 2021. Dapat diunduh pada <https://kliklegal.com/perdata-tunda-pidana-atau-pidana-tunda-perdata/>.